

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga daerah otonom dapat melaksanakan kepentingannya berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap maka diperlukan usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pemberian otonomi di daerah ini didasarkan pada pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 22 tahun 1999 yang diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom. Kemudian dipertegas dalam pasal 4 ayat (1) bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pembangunan memerlukan perencanaan dan program yang baik serta dana yang memadai yang berasal dari dalam negeri (tabungan) maupun luar negeri (pinjaman pemerintah). Sumber pembangunan di daerah diperoleh dari pemerintah pusat dan sumber dana yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri, maka daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi karena tidak semua sumber pembiayaan diberikan kepada daerah otonom, maka daerah diharuskan mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam prospek otonomi daerah di negara Republik Indonesia, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai faktor antara lain keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber

Pajak merupakan salah satu andalan pemerintah dalam pembangunan dan juga berfungsi sebagai pengatur stabilitas ekonomi serta sebagai alat pemerataan pendapatan. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan penting tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan karena merupakan pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang digunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2001).

Salah satu variabel penerimaan dalam sektor pajak pusat adalah sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sektor PBB merupakan sektor pajak yang memiliki asset yang cukup banyak, mengingat letak geografis Kabupaten Sleman yang strategis memungkinkan timbulnya penerimaan sektor pajak yang besar, akan tetapi ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi mempengaruhi penerimaan sektor pajak yaitu tingkat kesadaran masyarakat, penyimpangan, sistem dan prosedur pelayanan yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti bermaksud meneliti penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman tahun 2000-2004. Sehingga peneliti mengambil judul **“ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus KP PBB Sleman)”**

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Permasalahan pada penulisan skripsi ini dibatasi pada kinerja keuangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sleman Tahun

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah potensi Pajak Bumi dan Bangunan meningkat dari tahun ke tahun?
3. Apakah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah efektif?
4. Apakah ada pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan terhadap PAD di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui peningkatan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan terhadap PAD di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui apakah pemungutan PBB telah dilakukan secara efektif di Kabupaten Sleman.
4. Untuk mengetahui pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Sleman  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KP PBB Sleman dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BPKKD Sleman dalam mengelola keuangan daerah dan mencari upaya dalam meningkatkan PBB.
3. Bagi Akademisi  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
4. Bagi Pembaca  
Menambah wawasan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan